

IDENTIFIKASI NILAI KONSERVASI TINGGI KAWASAN KEBUN KELAPA SAWIT

PT BUMILANGGENG PERDANATRADA (Kabupaten Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah)



**TROPENBOS INTERNATIONAL
INDONESIA PROGRAMME**

2013



RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang menghendaki dipastikannya pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya. Di lain pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat luas pun semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan alam untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia, bumi dan isinya.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (PT BLP) merupakan salah satu dari sekian banyak perkebunan kelapa sawit swasta yang berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua tahap operasional perusahaan. Paradigma pembangunan berkelanjutan kini telah dijadikan sebagai haluan baru dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan, tidak terkecuali pembangunan sektor perkebunan yang membutuhkan hamparan lahan luas. Kerusakan lingkungan, penurunan keanekaragaman hayati, degradasi lahan, deforestasi, terpinggirkannya masyarakat lokal, berkurangnya satwa langka, peningkatan emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya merupakan isu negatif terhadap bisnis perkelapasawitan yang sedang marak akhir-akhir ini. Untuk menjawab isu tersebut, stakeholder kelapa sawit internasional telah sepakat membentuk asosiasi nirlaba yaitu *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Organisasi ini bertujuan mengimplementasikan standar global untuk perkelapasawitan berkelanjutan.

PT BLP yang mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan perusahaan, kini semakin diperkuat dengan langkah-langkah nyata yang dilakukan agar dapat memenuhi kriteria berstandar internasional, baik untuk perkebunan kelapa sawit maupun pabrik pengolahannya. Wujud komitmen perusahaan ini dalam rangka penerapan prinsip pembangunan sawit berkelanjutan adalah dengan melaksanakan identifikasi kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya.

Melalui identifikasi NKT, tempat-tempat yang mempunyai nilai konservasi tinggi akan dikenali, dilindungi dan dikelola. Perlindungan dan pengelolaan areal NKT di dalam unit pengelolaan ini merupakan sumbangan yang amat berarti bagi



keberlanjutan lingkungan alam dan karenanya berarti pula bagi keberlanjutan perusahaan.

Terdapat beberapa isu penting kaitannya dengan kegiatan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP ini. Beberapa isu penting tersebut antara lain adalah; penurunan tingkat keanekaragaman hayati, okupasi lahan dan isu sosial seperti perburuan liar.

Konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau *High Conservation Value* (HCV) didesain dengan tujuan membantu para pengelola kawasan dalam upayanya meningkatkan keberlanjutan fungsi sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksinya. Pendekatan pengelolaan yang digunakan terdiri dua tahap, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di dekat suatu Unit Pengelolaan (UP) yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan/atau ekologis yang sangat penting, dan
- 2) Menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai-nilai tersebut

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan identifikasi keberadaan NKT pada Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP adalah:

- 1) Mengidentifikasi keberadaan NKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP seluas 7.500 Ha.
- 2) Menyusun rekomendasi pengelolaan, sebagai acuan dalam rencana kegiatan pengelolaan terhadap kawasan ber-NKT yang teridentifikasi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP.
- 3) Menyusun rekomendasi pemantauan, sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan pemantauan terhadap kawasan ber-NKT yang teridentifikasi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP.

1.3. Keluaran

Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

- 1) Teridentifikasinya keberadaan NKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP.
- 2) Tersusunnya rekomendasi pengelolaan dan pemantauan terhadap kawasan ber-NKT yang teridentifikasi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP.

1.4. Tim Penilai

Tim penilai terdiri dari Ketua Tim, Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli serta Tenaga Ahli Pemetaan atau GIS. Secara lengkap anggota Tim Penilaian NKT pada Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP disajikan pada **Tabel 1**.



Tabel 1. Daftar Tim Penilaian NKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP, Kabupaten Kotawaringin Barat - Kalimantan Tengah.

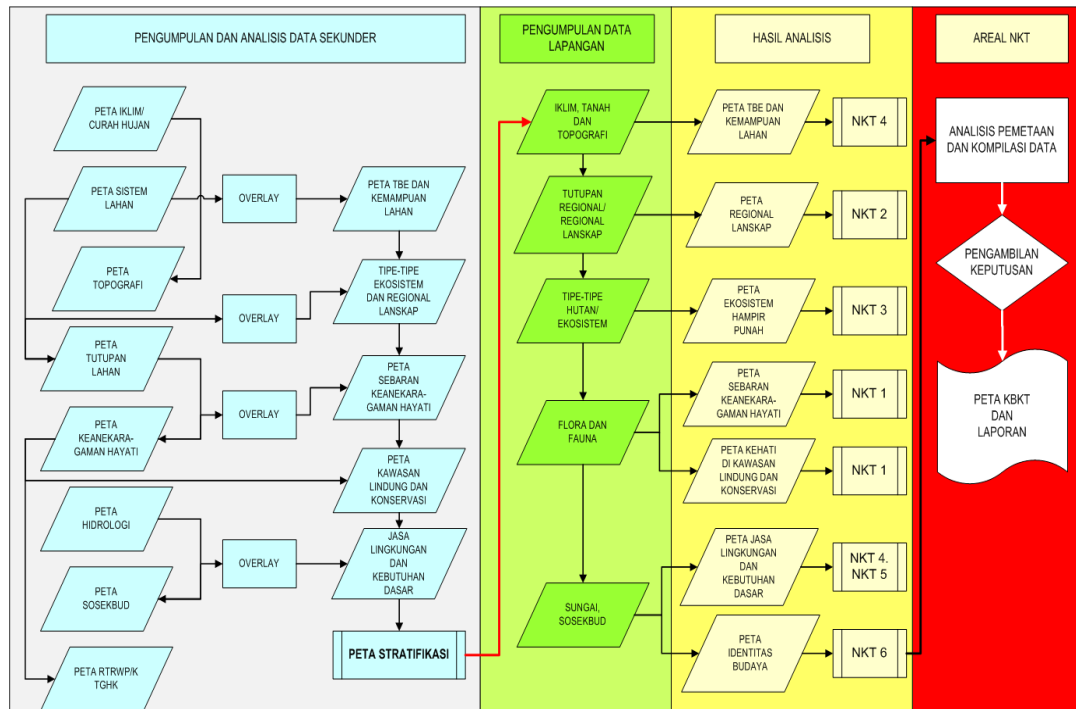
No	Nama Tenaga Ahli	Bidang	Akreditasi RSPO
1	Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi	- Ketua Tim - Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya	Terdaftar
2	Dr. Harnios Arief	Tenaga Ahli bidang Keanekaragaman Hayati	Terdaftar
3	Dr. Rachmad Hermawan	Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan	Terdaftar
4	Kasuma Wijaya, S.Hut, M.Si	Tenaga Ahli bidang GIS	-
5	Yanuar Wicaksono, Amd	Asisten Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwaliar	Terdaftar
6	Catur Wiradityo, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwaliar	-
7	Domi Suryadi	Asisten Tenaga Ahli bidang Flora/Tumbuhan	-
8	Afroh Manshur, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Flora/Tumbuhan	-
9	Berry Lirra Rafiu, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan	-
10	Rikto, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan	-
11	Zulkifli Hasibuan, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Jasa Lingkungan	-
12	Ir. Agung Wibawa	Tenaga Ahli bidang Sosial Ekonomi dan Budaya	-
13	Ardi Prasetyo, S.Hut	Asisten Tenaga Ahli bidang Fauna/Satwaliar	-
14	Yuli Nugroho, S.Si	Tenaga Ahli bidang GIS	-

2. Metode Penilaian NKT

Secara garis besar, kegiatan Identifikasi dan Analisis Keberadaan NKT 1 – NKT 6 di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP, dengan tahapan kegiatan sesuai seperti yang disajikan pada **Gambar 1 dan 2**.



Gambar 1 Proses identifikasi NKT



Gambar 2 Proses dan tahapan kegiatan dalam penentuan NKT.

3. Temuan-Temuan NKT

3.1. Identifikasi Keberadaan NKT

Hasil identifikasi keberadaan NKT pada Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP, secara rinci disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Hasil Identifikasi Keberadaan NKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP

NKT		Keberadaan NKT 4
1	Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	
1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	Ada
1.2	Spesies Hampir Punah	Ada
1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population)	Ada
1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	Ada
2	Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami	
2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami	Tidak Ada
2.2	Kawasan Alam yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak Terputus (berkesinambungan)	Tidak Ada
2.3	Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami	Ada
3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem yang Langka atau Terancam Punah	Tidak Ada
4	Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	
4.1	Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	Ada
4.2	Kawasan yang Penting bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	Tidak Ada
4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan atau Lahan	Tidak Ada
5	Kawasan Alam yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	Tidak Ada
6	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	Ada



3.2. Hasil Analisis Keberadaan NKT

Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) dengan luasan areal KBKT tersebut adalah **4.829,95** Ha atau sekitar **64,40** % dari total luas HGU. KBKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP disajikan pada **Tabel 3**. Peta KBKT disajikan pada **Gambar 3**.

Tabel 3. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP, Kabupaten Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah.

No	KBKT	Luas (Ha)	Atribut NKT
1	Areal Bergambut	4.474,78	4.1.
2	Mata Air Albi	15,62	4.1.
3	Mata Air Kubing	14,42	4.1.
4	Mata Air Musabeu	14,38	4.1.
5	Mata Air Rogia	15,60	4.1.
6	Mata Air Tanjung Lingga	15,94	4.1.
7	Mata Air F38	23,75	4.1.
8	Mata Air RTBM	13,66	4.1.
9	Mata Air Tanjung Penghujan	13,93	4.1.
10	Waduk sungai Rokok	2,99	4.1.
11	Waduk G38 A	1,03	4.1.
12	Waduk G38 B	0,31	4.1.
13	Waduk Penyiraman A Blok I 33	1,37	4.1.
14	Waduk Penyiraman B Blok I 33	1,23	4.1.
15	Waduk Tanjung Pandan	1,28	4.1.
16	Waduk F 36 A	1,63	4.1.
17	Waduk F 36 B	1,30	4.1.
18	Sempadan Sungai Bedaun	7,22	4.1.



No	KBKT	Luas (Ha)	Atribut NKT
19	Sempadan Sungai Bakung	21,11	4.1.
20	Sempadan Sungai Seluang	41,81	4.1.
21	Areal Berhutan Blok G38	4,23	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.3.
22	Areal Berhutan Blok J49	17,91	1.1., 1.3., 1.4., 2.3.
23	Areal Berhutan Blok D29	124,43	1.1., 1.3., 2.3.
24	Bale Sesajen	0,0025	6
25	Tiang Ulin (Keramat)	0,0025	6

4. Ringkasan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan

Ringkasan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT BLP disajikan pada **Tabel 4** dibawah ini;

Tabel 4 Ringkasan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan

NKT	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
NKT 1	1) Bahaya kebakaran mengingat adanya permukiman dan ladang masyarakat di dalam dan sekitar kawasan UP. 2) Perambahan/okupasi terhadap kawasan lindung. 3) Konversi kawasan lindung karena sebagian besar kawasan ini masih dimiliki oleh masyarakat (Blok B35 dan J49). 4) Perburuan satwaliar. 5) Penebangan liar. 6) Penambangan emas tanpa izin (PETI)	1) Pengelolaan yang bersifat umum yang meliputi seluruh tipe dan kondisi kawasan lindung; 2) Pengelolaan khusus di setiap kondisi kawasan lindung; 3) Pengelolaan kawasan lindung terkait dengan konektivitas antar kawasan lindung. 4) Flora <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengamanan secara intensif di sekitar tempat tumbuhnya jenis hampir punah • Melakukan penandaan di setiap individu agar tidak ditebang. • Memasang papan-papan informasi larangan di daerah aktivitas manusia. • Menyusun prosedur operasional standar perlindungan dan pelestarian tumbuhan hampir punah. • Melakukan pembibitan dan menanamnya sebagai tanaman pengayaan di dalam kawasan lindung. 	1) Tingkat dan distribusi kerusakan kawasan lindung, baik akibat aktivitas UP maupun aktivitas lainnya 2) Tingkat efektivitas sosialisasi/pendidikan lingkungan yang ditunjukkan dari besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu mengamankan kawasan dan/atau secara aktif memelihara kawasan lindung. 3) Tingkat Keberhasilan program rehabilitas berupa: <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase luas areal rehabilitasi/pengayaan b) Persentase tumbuh tumbuhan rehabilitasi/pengayaan 4) Tingkat kerusakan/gangguan kawasan lindung akibat aktivitas UP 5) Tingkat keanekaragaman tumbuhan di dalam kawasan lindung 6) Tingkat keanekaragaman dan pertumbuhan populasi satwaliar 7) Tingkat neraca air dalam areal bergambut dan subsidensinya

NKT	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau staf UP secara berkala. <p>5) Fauna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi populasi satwaliar meliputi : a) kepadatan; b) distribusi dan daerah jelajah/teritori; c) struktur umur; dan d) seks rasio (khususnya jenis mamalia dan primata). • Inventarisasi Habitat Satwaliar meliputi : kelimpahan dan ketersediaan pakan satwaliar langka/dilindungi, ketersediaan dan kualitas sumber air, persentase fragmentasi habitat, terutama bagi satwaliar arboreal murni dan tingkat aktivitas manusia. • Intensitas gangguan yang meliputi perburuan/pemanenan satwaliar, perusakan/penghilangan habitat, penggunaan bahan B3 	
NKT 2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konversi habitat satwaliar pada areal KBKT 2) Menurunnya sumber pakan satwa karena <ol style="list-style-type: none"> a) Pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam badan-badan air b) Penambangan emas tanpa izin c) Menurunnya kelimpahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dokumen pengelolaan habitat penting dalam jangka panjang, menengah dan pendek. 2) Melakukan pengukuhan kawasan NKT 2 yang disahkan oleh dewan direksi dan para pihak terkait yang kegiatannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan areal b) sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. c) Pembebasan kawasan dari kepemilikan masyarakat dan atau melakukan kesepakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan populasi satwa predator meliputi : a) kepadatan; b) distribusi dan daerah jelajah/teritori; c) struktur umur; dan d) seks rasio; 2) Pemantauan habitat satwa predator meliputi : a) kualitas dan kuantitas pakan; b) kualitas/kuantitas dan distribusi sumber air; c) fragmentasi dan sumber fragmentasi habitat; d) kecenderungan perubahan tutupan lahan dan suksesi. 3) Intensitas gangguan yang meliputi perburuan/pemanenan satwa liar, perusakan/penghilangan habitat, penggunaan

NKT	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
	<p>pakan satwa akibat pengendalian hama, terutama hewan kecil, yang tidak terkendali.</p> <p>d) Pembasmian mamalia-mamalia kecil sebagai sumber pakan</p> <p>3) Kebakaran lahan.</p>	<p>dengan para pihak.</p> <p>d) Penataan batas, pemasangan pal batas dan penandaan batas luar di batang-batang pohon.</p> <p>e) Pemasangan papan informasi</p> <p>3) Pengamanan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.</p> <p>4) Membangun kesepakatan dengan para pihak, terutama masyarakat lokal</p> <p>5) Penyusunan SOP pengelolaan NKT 2</p> <p>6) Secara periodik melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan staf UP.</p>	<p>Bahan Baku Berbahaya (B3) yang berpotensi mencemarkan daerah perairan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan populasi satwa.</p>
NKT 3	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
NKT 4	<p>1) Minimnya pemahaman Masyarakat dan Staff UP mengenai arti pentingnya KBKT bagi keberlanjutan pengelolaan kebun dan kelestarian lingkungan.</p> <p>2) Kebakaran Lahan</p> <p>3) Belum jelasnya batas-batas KBKT berdampak pada pembukaan lahan oleh kontraktor terjadi secara serampangan.</p> <p>4) Kegiatan penebangan pohon-pohonan dan perambahan pada</p>	<p>1) Sosialisasi hasil identifikasi areal yang bernilai konservasi tinggi.</p> <p>2) Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, karyawan, buruh harian lepas dan kontraktor tentang pentingnya fungsi areal bernilai konservasi tinggi yang memberi jasa-jasa lingkungan.</p> <p>3) Penataan dan penandaan batas areal yang teridentifikasi sebagai NKT 4, yang diikuti dengan pemasangan papan keterangan lokasi NKT 4, pemasangan rambu-rambu yang berisi larangan dan himbauan, terutama pencegahan kebakaran dan perladangan serta penebangan pohon yang sudah ada di areal yang mempunyai</p>	<p>1) Monitoring intensitas gangguan (perambahan, penebangan, kebakaran).</p> <p>2) Monitoring debit dan kualitas air sungai, waduk, mata air dan kawasan lindung gambut. secara rutin dengan periode tertentu.</p> <p>3) Monitoring tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi.</p> <p>4) Monitoring tingkat sedimentasi di sungai dan waduk.</p> <p>5) Monitoring tinggi muka air di rawa dan kawasan lindung gambut</p>

NKT	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
	<p>areal-areal yang mengandung NKT 4.</p> <p>5) Kegiatan penambangan emas di areal-areal yang mengandung NKT 4.</p>	<p>NKT 4.</p> <p>4) Pengendalian kegiatan penambangan emas tanpa ijin dengan cara persuasif</p> <p>5) Kegiatan pengamanan kawasan dengan patroli yang dilaksanakan secara rutin.</p> <p>6) Pengendalian penggunaan bahan kimia sintetik (pupuk dan pestisida), terutama di blok-blok tanaman yang berdekatan dengan badan-badan air seperti sungai, sehingga tidak menyebabkan menurunnya kualitas air.</p> <p>7) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan NKT 4.</p> <p>8) Penyusunan prosedur baku yang dituangkan kedalam SOP Pengelolaan NKT 4.</p>	
NKT 5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
NKT 6		<p>1) Menetapkan batas areal yang mengandung NKT 6 dengan menggunakan pagar sebagai batas areal NKT. Penetapan batas dilakukan secara partisipatif dengan Ketua Adat dan Kepala Desa, dengan demikian batas yang ditetapkan tidak menjadikan konflik atau masalah di kemudian hari.</p> <p>2) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada karyawan, buruh harian lepas dan kontraktor tentang arti penting areal NKT 6.</p> <p>3) Menetapkan sanksi terhadap karyawan, buruh dan kontraktor yang melakukan pelanggaran</p>	<p>1) Memantau keberadaan areal yang sudah ditetapkan secara berkala.</p> <p>2) Memperbaiki batas areal yang ditetapkan secara partisipatif apabila ada yang rusak dan membersihkan areal tersebut dari semak belukar atau tumbuhan semak lainnya.</p> <p>3) Memantau pemanfaatan areal yang sudah ditetapkan melalui pencatatan kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat.</p> <p>4) Memantau efektifitas penyuluhan dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan khususnya bagi buruh</p>

NKT	Ancaman	Rekomendasi Pengelolaan	Rekomendasi Pemantauan
		<p>yang mengakibatkan perusakan terhadap identitas budaya tersebut.</p> <p>4) Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketua Adat terkait dengan pemanfaatan area-area tersebut oleh masyarakat, sehingga perusahaan dapat mengakomodasikan waktu dengan kegiatan masyarakat tersebut dalam operasional perusahaannya.</p> <p>5) Menyusun Rencana Monitoring dan Standar Operasional Prosedur (SOP) areal-area yang penting bagi identitas budaya masyarakat setempat.</p> <p>6) Pemasangan rambu-rambu yang berisi larangan dan himbauan agar areal NKT 6 tersebut dapat dipelihara dan dilestarikan keberadaannya,</p> <p>7) Memadukan kegiatan pengelolaan NKT 6 ke dalam pengelolaan perkebunan secara menyeluruh, agar supaya dapat diperoleh kepastian mengenai pembiayaan, pelaksana pengelolaan dan kegiatan apa yang akan dilakukan.</p>	<p>harian lepas, kontraktor dan karyawan, dengan menggunakan kuisisionair terkait dengan keberadaan areal NKT 6.</p> <p>5) Memantau secara rutin kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa sekitar untuk menyusun strategi pengembangan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi budaya dan mata pencaharian masyarakatnya.</p>